

Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peran Audit Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat

Sindy Fuji Lestari¹, Hastuti²

¹Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Bandung, Bandung 40012
E-mail : sindy.fuji.amp16@polban.ac.id

²Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Bandung, Bandung 40012
E-mail : hastuti@polban.ac.id

ABSTRAK

Laporan keuangan merupakan hal penting bagi pemerintah karena merupakan salah satu bentuk upaya konkrit untuk menunjukkan akuntabilitas dan transparansi. Kualitas dari laporan keuangan dapat dilihat dari pemenuhan karakteristik kualitatif serta hasil opini BPK. Pemerintah Provinsi Jawa Barat, untuk tahun anggaran 2018 memperoleh opini WTP dari BPK sehingga telah 8 kali berturut-turut memperoleh WTP. Namun ternyata, masih terdapat kelemahan yang ditemukan BPK, salah satunya dari penggunaan aplikasi SIPKD dikarenakan kurangnya SDM. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari kompetensi SDM, penerapan SIPKD, dan peran audit internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah provinsi Jawa Barat. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif, dengan populasinya berjumlah 45 Organisasi Perangkat Daerah, sampel ditentukan menggunakan teknik non Probability sampling dengan pendekatan purposive sampling, sehingga diperoleh sampel 37 OPD dengan total jumlah responden sebanyak 111 responden. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner dan wawancara, serta analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil dari penelitian adalah secara simultan dan parsial kompetensi SDM, penerapan SIPKD, dan peran audit internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Ini menunjukkan bahwa pemerolehan opini WTP selama 8 kali berturut-turut ini diakibatkan oleh adanya kerjasama antar elemen dari pemerintah provinsi Jawa Barat untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Kata Kunci

Kompetensi SDM, SIPKD, Audit Intenal, Laporan Keuangan

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2003 pasal 31 tentang Keuangan Negara, dijelaskan bahwa “Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir”. Laporan keuangan merupakan hal yang penting bagi pemerintah karena sebagai salah satu bentuk upaya konkrit untuk menunjukkan akuntabilitas dan transparansi. Laporan keuangan menurut PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, adalah “bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Negara/Daerah selama suatu periode”.

Dalam PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, disebutkan bahwa laporan keuangan pemerintah terdiri dari 7 komponen, yaitu Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan

Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) serta harus memenuhi karakteristik kualitatif yang menjadi prasyarat agar laporan keuangan tersebut dapat berkualitas sesuai dengan yang diinginkan. Dalam penyusunannya, harus memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun berdasarkan standar yang berlaku yaitu SAP berbasis akrual.

Penyusunan laporan keuangan dengan menggunakan basis akrual membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten dalam akuntansi serta perlu adanya dukungan dari teknologi informasi (Mahmudi, 2011). Sejak diterbitkannya PP No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, penggunaan teknologi informasi pada pemerintah daerah sudah menjadi sebuah keharusan. Namun, dalam penggunaannya dibutuhkan SDM yang kompeten dalam penggunaan teknologi informasi serta diperlukan pengendalian internal yang baik untuk mengontrol penggunaan teknologi informasi tersebut.

Adanya SDM yang kompeten dan dukungan dari teknologi informasi dapat membantu untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan. Kualitas dari laporan keuangan dapat dilihat dari pemenuhan akan karakteristik kualitatif yang terdiri dari andal, relevan, dapat dibandingkan dan dapat dipahami serta dari hasil opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selaku auditor eksternal atas pemeriksaan terhadap laporan keuangan yang telah disusun.

Selama 8 (delapan) tahun terakhir yaitu dari tahun 2011-2018 LKPD Provinsi Jawa Barat mengalami konsistensi yang baik dengan memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Hal ini menandakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah provinsi Jawa Barat telah sesuai dengan SAP dan pengendalian intern telah memadai dari kesalahan yang material. Menurut Sekda Jabar, opini WTP merupakan indikator yang menunjukkan bahwa tata kelola keuangan pemerintah daerah dilakukan dengan baik dan benar (jabarprov.go.id, diakses pada 27 Januari 2020).

Meskipun telah memperoleh opini WTP selama 8 kali berturut-turut, namun masih terdapat kelemahan yang ditemukan oleh BPK pada sistem pengendalian intern atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dalam LHP BPK tahun 2019 disebutkan bahwa dalam penyusunan laporan keuangan tahun anggaran 2018, penggunaan aplikasi SIPKD oleh seluruh OPD belum maksimal. Kurang maksimalnya penggunaan SIPKD menurut Kasubid Akuntansi dan Pelaporan II BPKAD Provinsi Jawa Barat dikarenakan terdapat kendala pada sumber daya manusia di masing-masing OPD. Kendala tersebut berupa terbatasnya jumlah administrator pada BPKAD dan operator SIPKD pada masing-masing SKPD, serta belum meratanya pengetahuan SDM tentang akuntansi, sistem akuntansi, dan bagan akun standar. Akibatnya, dari 42 OPD hanya 28 OPD yang dapat menyelesaikan laporan keuangan dengan menggunakan aplikasi SIPKD dan sisanya masih menyusun dengan manual. Penyusunan laporan keuangan dengan tidak menggunakan sistem atau manual akan mengakibatkan laporan keuangan yang disajikan kurang handal serta tidak tepat waktu.

Upaya untuk mengatasi keterbatasan sumber daya manusia dilingkungan pemda Jawa Barat, BPKAD selaku PPKD selalu melakukan bimbingan teknis dan pelatihan mengenai akuntansi, penyusunan laporan keuangan, dan yang berhubungan dengan keuangan serta menambah pegawai yang memiliki latar belakang TI dan akuntansi untuk menjadi operator dan administrator SIPKD. Selain itu juga, BPK memberikan rekomendasi kepada seluruh OPD untuk menggunakan aplikasi SIPKD serta kepada Kepala BPKAD dan Inspektorat untuk selalu

mengawasi penggunaan SIPKD. Oleh sebab itu, peran dari auditor internal untuk mengontrol penggunaan sistem sangat diperlukan. Sehingga, begitu pentingnya penggunaan SIPKD dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan yang didukung oleh kompetennya SDM serta adanya pengawasan internal.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka dapat dirumuskan rumusan masalah yaitu: Apakah Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan SIPKD, dan Peran Audit Internal berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah provinsi Jawa Barat.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia, Penerapan SIPKD, dan Peran Audit Internal secara parsial dan simultan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah provinsi Jawa Barat.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Laporan Keuangan

Laporan keuangan menurut PP No. 71 Tahun 2010, laporan keuangan ialah “Laporan yang disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan”.

Laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah berperan untuk kepentingan akuntabilitas, manajemen, transparansi, keseimbangan antargenerasi, dan evaluasi kinerja. Sedangkan tujuannya adalah untuk memberikan informasi keuangan yang bermanfaat bagi penggunaannya agar dapat membantu penggunaannya dalam mengambil sebuah keputusan ekonomi. Untuk dapat memenuhi peran dan tujuan dari disusunnya laporan keuangan, maka laporan keuangan tersebut harus berkualitas. Laporan keuangan yang berkualitas dapat dilihat dari terpenuhinya karakteristik kualitatif laporan keuangan, yaitu terdiri dari relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

2.2 Kompetensi Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan aset penting yang dimiliki oleh suatu organisasi sekaligus berperan penting dalam menentukan kemajuan sebuah organisasi ketika sumber daya manusia tersebut memiliki sebuah kompetensi.

Menurut Spencer, McClelland & Spencer (1994), kompetensi diartikan sebagai karakter individu yang dapat diukur dan ditentukan untuk menunjukkan perilaku dan performa kerja tertentu pada diri seseorang. Berdasarkan Permendagri nomor 2 tahun 2013, kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang pegawai negeri sipil, berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap prilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga pegawai negeri sipil tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien. Sehingga, kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang yang berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dapat mempengaruhi kinerjanya untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai.

2.3 Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) adalah aplikasi terpadu yang digunakan oleh pemerintah daerah sebagai alat bantu untuk meningkatkan efektifitas implementasi pengelolaan keuangan daerah berdasarkan asas efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel, dan auditabel (Kemendagri, 2010).

Sebagai sistem informasi, pengukuran keberhasilan aplikasi SIPKD bisa diukur dengan menggunakan indikator yang digunakan dalam mengukur keberhasilan sistem informasi yang dikemukakan oleh Bodnar dan Hopwood (2007), yaitu keamanan data, kecepatan dan ketepatan waktu, ketelitian, berhubungan dengan terbebasnya output berupa variasi laporan atau output, dan relevansi sistem.

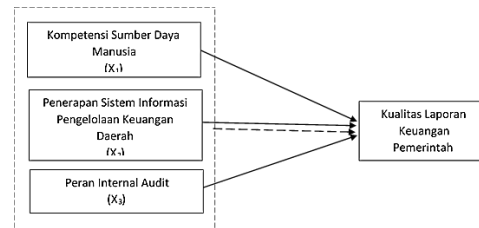
2.4 Audit Internal

Menurut ikatan auditor internal (IIA), audit internal adalah kegiatan independen dan objektif beserta konsultasi yang disusun untuk meningkatkan nilai dan operasional organisasi/perusahaan. Audit internal pada pemerintah dilaksanakan oleh Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang terdiri dari BPKP, Inspektorat Jenderal, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota yang diatur dalam PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Peran dari audit internal menurut PP No. 60 Tahun 2008, adalah melakukan pengawasan intern, yaitu proses kegiatan audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.

2.5 Paradigma Penelitian

Untuk melihat hubungan antar variabel, maka dapat digambarkan paradigma penelitian sebagai berikut.



Gambar 1. Paradigma Penelitian

2.6 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan paradigma penelitian, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut.

- H1 : Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
- H2 : Penerapan SIPKD berpengaruh secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
- H3 : Peran Internal Audit berpengaruh secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
- H4 : Kompetensi SDM, Penerapan SIPKD, dan Peran Internal audit secara simultan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Provinsi Jawa Barat yang berjumlah 45 OPD. Sampel ditentukan dengan menggunakan teknik *non probability sampling* dengan pendekatan *purposive sampling*. Kriterianya adalah OPD yang melaksanakan fungsi akuntansi dan pelaporan dan berada di wilayah Bandung Raya. Dari kriteria tersebut, maka terpilih 37 OPD yang dijadikan sampel dengan responden berjumlah 111 responden.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data subjek dan data dokumenter. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan kuesioner dan wawancara kepada kasubid akuntansi dan pelaporan I BPKAD Provinsi Jawa Barat.

3.5 Metode Analisis Data

3.5.1 Pengujian Instrumen

1. Uji Validitas
Uji validitas dilakukan menggunakan uji statistik product momen Pearson. Ketika nilai r hitung $\geq r$ tabel maka item pernyataan dapat dikatakan valid, namun ketika nilai r hitung $< r$ tabel maka item pernyataan tidak valid (Sugiyono, 2013).
2. Uji Reliabilitas
Uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan uji statistik Alpha Cronbach, dikatakan reliabel ketika nilai alpha cronbach > 0.70 (Ghozali, 2018).

3.5.2 Pengujian Asumsi Klasik

1. Uji Multikolinearitas
Uji Multikolinearitas dilakukan dengan melihat nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Model regresi terbebas dari multikolinearitas ketika nilai Tolerance ≥ 0.10 dan nilai VIF nya ≤ 10 (Ghozali, 2018:107).
2. Uji Heterokedastisitas
Uji heterokedastisitas dilakukan dengan menggunakan uji glejser. Uji Glejser dilakukan dengan meregresikan nilai absolut dari residual dengan masing-masing variabel independen. Ketika hasil dari signifikansinya > 0.05 , maka dapat dikatakan bahwa model regresi tidak terdapat heterokedastisitas. (Ghozali, 2018).
3. Uji Normalitas
Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan uji statistik non parametrik Kolmogorov-Smirnov. Ketika dari tabel Kolmogorov-smirnov nilai signifikansinya > 0.05 maka data berdistribusi normal.

3.5.3 Analisis Regresi Linear Berganda

Model regresi berganda dalam penelitian ini dinyatakan sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e \quad (1)$$

Keterangan :

Y = Kualitas Laporan keuangan; α = Konstanta; β_1 , β_2 , β_3 = Koefisien regresi; X_1 = Variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia; X_2 = Variabel Penerapan SIPKD; X_3 = Variabel Peran Internal Audit; e = Variabel error

3.5.4 Pengujian Hipotesis

Hipotesis statistik pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. $H_{01} : \beta = 0$, artinya kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan
 $H_{a1} : \beta \neq 0$, artinya kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan
2. $H_{02} : \beta = 0$, artinya penerapan SIPKD tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan
 $H_{a2} : \beta \neq 0$, artinya penerapan SIPKD berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan
3. $H_{03} : \beta = 0$, artinya peran internal audit tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan
 $H_{a3} : \beta \neq 0$, artinya peran internal audit berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan
4. $H_{04} : \beta = 0$, artinya Kompetensi SDM, Penerapan SIPKD, dan peran internal audit tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.
 $H_{a4} : \beta \neq 0$, artinya Kompetensi SDM, Penerapan SIPKD, dan peran internal audit berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Jika nilai signifikansi $< 0,05$ H_0 ditolak dan H_a diterima, dan sebaliknya jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Pengujian hipotesis pada penelitian ini adalah dengan menggunakan uji t, uji F dan koefisien determinasi (R^2).

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis Regresi Linear Berganda

Hasil regresi linear berganda adalah sebagai berikut.

Tabel 1. Regresi Linear Berganda

Model	Coefficients ^a		Beta	t	Sig.
	Unstandardized Coefficients Std. Error	Standardized Coefficients			
1 (Constant)	20.259	5.669		3.574	.001
X1	.311	.075	.394	4.128	.000
X2	.205	.080	.277	2.567	.012
X3	.115	.139	.086	.825	.411

a. Dependent Variable: Y

Dari Tabel 1, dapat diketahui persamaan regresi linear berganda dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

$$Y = 20.259 + 0.311X_1 + 0.205X_2 + 0.115X_3 \quad (2)$$

4.2 Pengujian Hipotesis

4.2.1 Uji t

Hasil uji t variabel X_1 terhadap Variabel Y dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. Uji t untuk Variabel X_1

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1(Constant)	31.576	4.951		6.378	.000
X1	.488	.059	.619	8.232	.000

a. Dependent Variable: Y

Dari tabel 2, dapat diketahui bahwa nilai signifikansi untuk variabel X_1 sebesar 0.000 yang lebih kecil dari 0.05 dan nilai t hitung (8.232) > t tabel (1.982) dengan nilai koefisien X_1 sebesar 0.488. Hal ini berarti bahwa dengan tingkat kepercayaan sebesar 95%, hipotesis H_a diterima yang berarti variabel X_1 (kompetensi SDM) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap variabel Y (kualitas laporan keuangan).

Hasil uji t variabel X_2 terhadap Variabel Y dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. Uji t untuk Variabel X_2

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1(Constant)	29.243	5.715		5.117	.000
X2	.432	.057	.585	7.531	.000

a. Dependent Variable: Y

Dari tabel 3, dapat diketahui bahwa nilai signifikansi untuk variabel X_2 sebesar 0.000 yang lebih kecil dari 0.05 dan nilai t hitung (7.531) > t tabel (1.982) dengan nilai koefisien X_2 sebesar 0.432. Hal ini berarti bahwa dengan tingkat kepercayaan 95% hipotesis H_a diterima yang berarti variabel X_2 (penerapan SIPKD) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap variabel Y (kualitas laporan keuangan).

Hasil uji t variabel X_3 terhadap Variabel Y dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4. Uji t untuk Variabel X_3

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1(Constant)	38.027	5.488		6.930	.000
X3	.685	.110	.513	6.242	.000

a. Dependent Variable: Y

Dari tabel 4, dapat diketahui bahwa nilai signifikansi untuk variabel X_3 sebesar 0.000 yang lebih kecil dari 0.05 dan nilai t hitung (6.242) > t tabel (1.982) dengan nilai koefisien X_3 sebesar 0.685. Hal ini

berarti bahwa dengan tingkat kepercayaan 95% hipotesis H_a diterima, yang berarti variabel X_3 (peran audit internal) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap variabel Y (kualitas laporan keuangan).

4.2.2 Uji F

Hasil uji f dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. Uji F

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1Regression	2912.302	3	970.767	29.263	.000 ^b
Residual	3549.591	107	33.174		
Total	6461.893	110			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X_3 , X_1 , X_2

Dari tabel 5, dapat diketahui nilai F hitung sebesar 29.263 dan nilai signifikansi sebesar 0.000. Hal ini berarti bahwa hipotesis H_a diterima yang berarti bahwa secara simultan X_1 , X_2 , dan X_3 bersama-sama berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap variabel Y.

4.3 Analisis Koefisien Determinasi

Hasil pengujian koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6. Determinasi Hasil Koefisien

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.671 ^a	.451	.435	5.759665

a. Predictors: (Constant), X_3 , X_1 , X_2

Dari tabel 6, dapat diketahui bahwa nilai koefisien determinasi (R Square) adalah sebesar 0.451 atau 45.1%. Hal ini berarti bahwa 45.1% perubahan variabel Y (kualitas laporan keuangan) disebabkan oleh variabel kompetensi SDM, Penerapan SIPKD, dan peran audit internal, sedangkan sisanya sebesar 54.9% dijelaskan oleh variabel yang tidak terdapat dalam model regresi atau variabel lain yang tidak diamati oleh peneliti.

4.4 Pembahasan

4.4.1 Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Hipotesis penelitian pertama yang diajukan yang menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah provinsi Jawa Barat telah terbukti atau diterima melalui uji t yang dilakukan, dihasilkan nilai t_{hitung} (8.232) > t_{tabel} (1.982). Dapat dikatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan

keuangan provinsi jawa barat. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin baik kompetensi yang dimiliki oleh ASN yang ada pada lingkungan pemerintah daerah provinsi jawa barat maka akan semakin baik pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Semakin baik kualitas laporan keuangan yang dihasilkan maka pemenuhan akan karakteristik kualitatif akan semakin terpenuhi.

4.4.2 Pengaruh Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Hipotesis penelitian kedua yang diajukan yang menyatakan bahwa penerapan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah provinsi jawa barat telah terbukti atau diterima melalui uji t yang dilakukan, dihasilkan nilai $t_{hitung} (7.531) > t_{tabel} (1.982)$. Dapat dikatakan bahwa penerapan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan provinsi jawa barat. Hal ini mengindikasikan bahwa sistem informasi pengelolaan keuangan daerah yang diterapkan pada pemerintah provinsi jawa barat berpengaruh pada peningkatan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

4.4.3 Pengaruh Peran Audit Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Hipotesis penelitian ketiga yang diajukan yang menyatakan bahwa peran audit internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah provinsi jawa barat telah terbukti atau diterima melalui uji t yang dilakukan, dihasilkan nilai $t_{hitung} (6.242) > t_{tabel} (1.982)$. Dapat dikatakan bahwa peran audit internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah provinsi jawa barat. Hal ini mengindikasikan bahwa inspektorat daerah selaku auditor internal berperan dalam peningkatan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

4.4.4 Pengaruh Kompetensi SDM, Penerapan SIPKD, dan Peran Audit Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Secara Simultan

Hipotesis penelitian keempat yang menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah, dan peran audit internal secara bersama-sama berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah telah terbukti melalui uji f yang dilakukan, diperoleh hasil $f_{hitung} (29.610) > f_{tabel} (2.68)$ Dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh positif yang signifikan dari kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah, dan peran audit internal terhadap

kualitas laporan keuangan pemerintah daerah provinsi jawa barat.

5. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan hipotesis yang telah diajukan serta dari analisis hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah provinsi jawa barat. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin baik kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki oleh pemerintah provinsi jawa barat khususnya pada bidang keuangan maka akan semakin baik pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.
2. Penerapan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah provinsi jawa barat. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin baik SIPKD diterapkan dalam pengelolaan keuangan daerah oleh pemerintah provinsi jawa barat maka laporan yang dihasilkan pula akan semakin baik.
3. Peran audit internal berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah provinsi jawa barat. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin baik audit internal dalam hal ini inspektorat daerah berperan aktif dalam mengawal dan mengawasi pengelolaan keuangan daerah sampai dengan penyusunan laporan keuangan, maka akan semakin baik pula laporan keuangan yang dihasilkan.
4. Kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah, dan peran audit internal secara simultan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah provinsi jawa barat, dengan besar pengaruhnya sebesar 45.1%. Sisanya sebesar 54.9% dipengaruhi oleh variabel lain. Hasil ini mengindikasikan bahwa ketika pemerintah daerah provinsi Jawa Barat memiliki SDM yang kompeten serta dibarengi dengan penerapan suatu sistem yang baik seperti SIPKD, dan adanya pengawasan dan pengawalan dari inspektorat daerah sebagai auditor internal terhadap pengelolaan keuangan daerah sampai disusunnya laporan keuangan maka akan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat sebagai perbaikan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu sebagai berikut.

1. Untuk pemerintah Provinsi Jawa Barat agar selalu senantiasa meningkatkan kompetensi SDM nya khususnya dalam bidang keuangan, karena sangat berpengaruh terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan, terlebih ketika ada peraturan, sistem dan kebijakan baru yang akan diterapkan.
2. Untuk dapat menambah variabel lain atau menambah model penelitian seperti menambahkan variabel moderating atau variabel intervening.
3. Memperluas wilayah penelitian, tidak hanya untuk opd yang berada di wilayah Bandung timur saja, sehingga semua OPD yang terdapat dalam pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat dijadikan sampel penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] _____. (2019, Desember 20). Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah. Diambil kembali dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri: <http://keuda.kemendagri.go.id/sipkd>
- [2] Aminah, Khairudin, & Indrayenti. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi & Keuangan* Vol. 10, No.1, 22-23.
- [3] Bastian, I. (2006). *Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- [4] Bodnar, G. H., & Hopwood, W. S. (2007). *Sistem Informasi Akuntansi*. Bandung: Penerbit Andi.
- [5] Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- [6] Halim, A., & Kusufi, M. S. (2012). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- [7] Halim, A., & Kusufi, M. S. (2012). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- [8] Harlinda. (2016). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau). *Jurnal SOROT* Volume 11, Nomor 2, 127-144.
- [9] Hasanah, Y. A., Sasongko, N., & Bawono, A. D. (2019). Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Peran Internal Audit, dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada SKPD di Pemerintah Kabupaten Sukoharjo). *The 9th University Research Colloquium* 2019.
- [10] Kiranayanti, I. A., & Erawati, N. M. (2016). Pengaruh Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Pemahaman Basis Akrua Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* Vol.16.2, 1290-1318.
- [11] Kuntadi, C. (2019). *Audit Internal Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- [12] Mahmudi. (2011). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UII Press.
- [13] Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- [14] Moehariono. (2014). *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi Edisi Revisi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- [15] Muflahah, & Malia, E. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Seminar Nasional Ekonomi, Manajemen & Akuntansi (SINEMA 2018)*.
- [16] Nordiawan, D., & Hertianti, A. (2010). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- [17] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- [18] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pengembangan Sistem Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
- [19] Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- [20] Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- [21] Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- [22] Pratiwi, W. (2016). *Audit Sektor Publik*. Jakarta: In Media.
- [23] Pujanira, P. (2017). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DIY. *Skripsi*.
- [24] BPK RI. (2019). *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2019*. Jakarta: BPK RI.
- [25] BPK RI. (2019). *Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018*. Bandung: BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat.
- [26] Sari, G. I., & Fadli. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi* Vol. 7, No. 3, 17-34.
- [27] Sari, L. N. (2014). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia Dan Peran Auditor Internal Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci). *Jurnal Akuntansi*.
- [28] Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- [29] Sutrisno, E. (2013). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Kencana Perdana Media Group.
- [30] Triyanti. (2017). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia di Bidang Akuntansi dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Magelang). *Skripsi*.
- [31] Tumbo, S. (2016). *Upaya Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri.
- [32] Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

[33] Widayanti, Y. (2019). Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tulungagung). Skripsi, 16.

[34] Xavierina, S. (2014). Analisis Pengaruh Implementasi Aplikasi SIPKD (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah) Terhadap Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Daerah pada Pemerintah Daerah Provinsi Lampung. Skripsi.